



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN  
MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
(LKjIP) 2018



Batusangkar, Februari 2019

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi atas pelaksanaan urusan pemerintah daerah Bidang Koperasi dan UMKM, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan Dinas Koperindag, secara garis besar laporan ini terdiri dari pengukuran kinerja, evaluasi serta pengungkapan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan, serta bahan evaluasi internal bagi dinas untuk upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam pencapaian Visi dan Misi sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperindag Tahun 2016-2021, sebagai dukungan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Tanah Datar 2016-2021.

Tentunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperindag ini masih jauh dari kesempurnaan, kami mohon saran dan usul perbaikan dari pihak terkait guna penyempurnaan penyusunan pada masa yang akan datang.

Batusangkar, Februari 2019

KEPALA DINAS KOPERINDAG  
KABUPATEN TANAH DATAR



**MARWAN, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631231 198501 1 002

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Aspek strategis Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan pembangunan dan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan :

1. *Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Koperasi dan UKM*
2. *Urusan Pilihan Bidang Perindustrian*
3. *Urusan Pilihan Bidang Perdagangan*

Serta hubungan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dengan Visi dan Misi perangkat daerah, aspek strategis Dinas Koperindag adalah :

1. Pelaksana pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan di sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
2. Memperkuat integritas aparatur, tata kelola pemerintahan yang baik dan penerapan Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dilingkungan Dinas Koperindag.

Berdasarkan visi dan misi yang akan dicapai perlu kiranya menentukan sasaran strategis dan indikator kinerja yang akan dicapai tahun pada tahun 2018 ini, yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016-2021 serta Penetapan Kinerja (Tapkin) 2018 selaras dengan sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021.

Secara umum pencapaian sasaran strategis melalui indikator-indikator kinerja pendukungnya dapat terelisasi dengan baik, dengan pencapaian masing-masing sasaran sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>1. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi</b>	a. Persentase penambahan koperasi aktif (%)	0,5 (92,02)	0,5 (91,52)	99,46
	b. Peningkatan volume usaha koperasi (%)	5	11	220,00
	c. Peningkatan skala usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (Unit)	80	80	100,00
	d. Peningkatan wirausahawan pemula (orang)	120	120	100,00
<b>2. Meningkatnya daya saing</b>	a. Peningkatan jumlah IKM formal (unit)	14	35	250,00

<b>industri daerah</b>	b. Persentase peningkatan volume usaha IKM (%)	0,3	13,20	
<b>3. Berkembangnya perdagangan daerah</b>	a. Jumlah pedagang informal menjadi formal (pedagang)	50	130	260,00
	b. Penambahan pasar yang representatif (pasar)	2	3	150,00
	c. Jumlah pasar nagari yang dikelola dengan kategori baik (pasar)	4	4	100,00
<b>4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD</b>	Predikat akuntabilitas kinerja OPD	BB	BB	100

Sesuai dengan tupoksi dan prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Pada Tahun Anggaran 2018 melaksanakan 17 program dan 42 kegiatan, guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dialokasikan dana sebesar Rp 26.322.958.649,- dari dana APBD Kabupaten Tanah Datar, yang terdiri dari dana **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp 3.833.846.900,- dan **Belanja Langsung** sebesar Rp 22.489.111.749,-. Untuk pelaksanaan Program dan kegiatan tahun 2018, realisasi Belanja Langsung adalah 81,38% dengan rincian belanja sebagai berikut :

No.	Belanja	Anggaran (%)	Realisasi (%)	%
1	<b>Belanja Pegawai</b>	160.162.900,00	134.865.000,00	84,20
2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.526.068.662,00	6.688.317.627,00	88,87
3	<b>Belanja Modal</b>	14.802.880.187,00	11.479.872.337,00	77,55
<b>Jumlah</b>		<b>22.489.111.749,00</b>	<b>18.303.054.964,00</b>	<b>81,38</b>

Demikian capaian rata-rata sasaran strategis yang dicapai serta realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperindag Kab. Tanah Datar tahun 2018, pengukuran kinerja, evaluasi serta pengungkapan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja yang mendukung pencapaiannya dapat diuraikan pada Bab-Bab selanjutnya pada laporan ini.

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I      PENDAHULUAN

1.1   Tugas Pokok dan Fungsi

1.2   Aspek Strategis

BAB II     PERENCANAAN KINERJA

2.1   Rencana Strategis

2.2   Indikator Kinerja Utama

2.3   Rencana Kerja Tahunan

2.4   Penetapan Kinerja

BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA

3.1   Capaian Kinerja

3.2   Realisasi Keuangan

BAB IV    PENUTUP

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. *Tugas Pokok dan Fungsi***

Sebagai mana Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor : 16 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

##### **A. Dinas :**

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian serta perdagangan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian serta perdagangan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian serta perdagangan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**B. Sekretariat**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
  - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat kearsipan dan dokumentasi;
  - c. penataan organisasi dan tata laksana;
  - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**C. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :
  - b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
  - c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
  - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan koperasi

- serta pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- e. pelaporan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

#### **D. Bidang Perindustrian**

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang data, standarisasi dan pengawasan, industri agro dan industri non agro;
  - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang data, standarisasi dan pengawasan, industri agro dan industri non agro;
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang data, standarisasi dan pengawasan, industri agro dan industri non agro;
  - d. pelaporan di bidang data, standarisasi dan pengawasan, industri agro dan industri non agro; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **E. Bidang Perdagangan**

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina usaha dan sarana, pengembangan dan promosi serta pengawasan;



- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang bina usaha dan sarana, pengembangan dan promosi serta pengawasan;
- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan di bidang bina usaha dan sarana, pengembangan dan promosi serta pengawasan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang bina usaha dan sarana, pengembangan dan promosi serta pengawasan;
- e. pelaporan di bidang bina usaha dan sarana, pengembangan dan promosi serta pengawasan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## 1.2. Struktur Organisasi

Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Struktur Organisasi Dinas Koperindag adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terdiri dari:
  - 1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
  - 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
  - 3. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- d. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
  - 1. Seksi Data, Standarisasi dan Pengawasan;
  - 2. Seksi Industri Agro; dan
  - 3. Seksi Industri Non Agro.
- e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Bina Usaha dan Sarana;
  - 2. Seksi Pengembangan dan Promosi; dan

- 3. Seksi Pengawasan.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 1.3. Aspek Strategis

Aspek strategis Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan pembangunan dan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan :

1. *Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Koperasi dan UKM*
2. *Urusan Pilihan Bidan Perindustrian*
3. *Urusan Pilihan Bidang Perdagangan*

Serta hubungan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dengan Visi dan Misi perangkat daerah, aspek strategis Dinas Koperindag adalah :

1. Pelaksana pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan di sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
2. Memperkuat integritas aparatur, tata kelola pemerintahan yang baik dan penerapan Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dilingkungan perangkat daerah.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

Rencana Strategis Dinas Koperindag pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Yang bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di Lingkungan Dinas Koperindag melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperindag tahun 2016-2021 telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi perangkat daerah.

Sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan *Bidang Koperasi dan UKM, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan*, hubungan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dengan Visi dan Misi Dinas Koperindag yang nantinya dijabarkan pada Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan adalah sebagai mana gambar berikut :

**Hubungan RPJMD Kabupaten Tanah Datar  
dengan  
Rencana Strategis Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar**



## 2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja Dinas Koperindag berisikan penugasan dari Bupati Tanah Datar untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui Perjanjian Kinerja inilah, kinerja Dinas Koperindag menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja tahun 2018 telah selaras dengan Rencana Kinerja Utama 2016 - 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperindag Tahun 2016-2021 dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Dinas Koperindag tahun 2018 sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target
Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	a. Persentase penambahan koperasi aktif (%)	0,5
	b. Peningkatan volume usaha koperasi (%)	5
	c. Peningkatan skala usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (Unit)	80
	d. Peningkatan wirausahawan pemula (orang)	120
Meningkatnya daya saing industri daerah	a. Peningkatan jumlah IKM formal (unit)	14
	b. Persentase peningkatan volume usaha IKM (%)	0,3
Berkembangnya perdagangan daerah	a. Jumlah pedagang informal menjadi formal (pedagang)	50
	b. Penambahan pasar yang representatif (pasar)	2
	c. Jumlah pasar nagari yang terkelola dengan kategori baik (pasar)	4
Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Predikat akuntabilitas kinerja OPD	BB

Program		Anggaran	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	460.853.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	223.845.000,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	23.750.000,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp.	26.000.000,00
5	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Rp.	169.822.400,00
6	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Rp.	211.704.000,00

7	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Rp.	928.576.500,00
8	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Rp.	15.835.151.787,00
9	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp.	157.300.000,00
10	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp.	60.000.000,00
11	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp.	17.030.000,00
12	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Rp.	54.700.000,00
13	Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perdagangan	Rp.	472.880.500,00
14	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp.	333.309.300,00
15	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Rp.	85.708.000,00
16	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp.	20.000.000,00
17	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Rp.	3.408.481.262,00
<b>Total</b>		Rp.	<b>22.489.111.749,00</b>

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperindag merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2018. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya, sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>5. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi</b>	e. Persentase penambahan koperasi aktif (%)	0,5 (92,02)	0,5 (91,52)	99,46
	f. Peningkatan volume usaha koperasi (%)	5	11	220,00
	g. Peningkatan skala usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (Unit)	80	80	100,00
	h. Peningkatan wirausahawan pemula (orang)	120	120	100,00
<b>6. Meningkatnya daya saing industri daerah</b>	c. Peningkatan jumlah IKM formal (unit)	14	35	250,00
	d. Persentase peningkatan volume usaha IKM (%)	0,3	13,20	
<b>7. Berkembangnya perdagangan daerah</b>	d. Jumlah pedagang informal menjadi formal (pedagang)	50	130	260,00
	e. Penambahan pasar yang representatif (pasar)	2	3	150,00
	f. Jumlah pasar nagari yang terkelola dengan kategori baik (pasar)	4	4	100,00
<b>8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD</b>	Predikat akuntabilitas kinerja OPD	BB	BB	100

### 3.2 EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Uraian Capaian Kinerja masing-masing Tujuan dan Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut :

<b>Sasaran 1</b>	<b>Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi</b>
------------------	--

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a. Persentase penambahan koperasi aktif (%)	0,5 (92,02)	-0,5 (91,52)	99,46
b. Peningkatan volume usaha koperasi (%)	5 (Rp. 301.174.335.000)	11 (Rp. 314.476.844.000)	220,00
c. Peningkatan skala usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (Unit)	80	80	100
d. Peningkatan wirausahawan pemula (orang)	120	120	100

#### 1. *Persentase Jumlah Koperasi yang Aktif*

Pada indikator Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang Aktif pada tahun 2018 ini ditargetkan meningkat 0,5% dari pencapaian tahun 2017 91,52% menjadi 92,02%. Pada tahun 2017 jumlah koperasi aktif adalah sebanyak 205 koperasi dari 224 jumlah koperasi keseluruhan. Pada tahun 2018 ini jumlah koperasi aktif tidak mengalami penambahan, sehingga tingkat capaian indikator ini adalah 99,46%.

#### 2. *Peningkatan Volume Usaha Koperasi*

Volume usaha koperasi pada tahun 2017 ini ditargetkan meningkat sebesar 5% atau dari capaian tahun 2017 yang lalu yaitu Rp. 285.357.055.000,- menjadi Rp. 301.174.335.000,- dari 205 koperasi yang aktif dan dapat terealisasi sebesar Rp. 314.476.844.000, (11%) atau dengan tingkat capaian 220,00%.

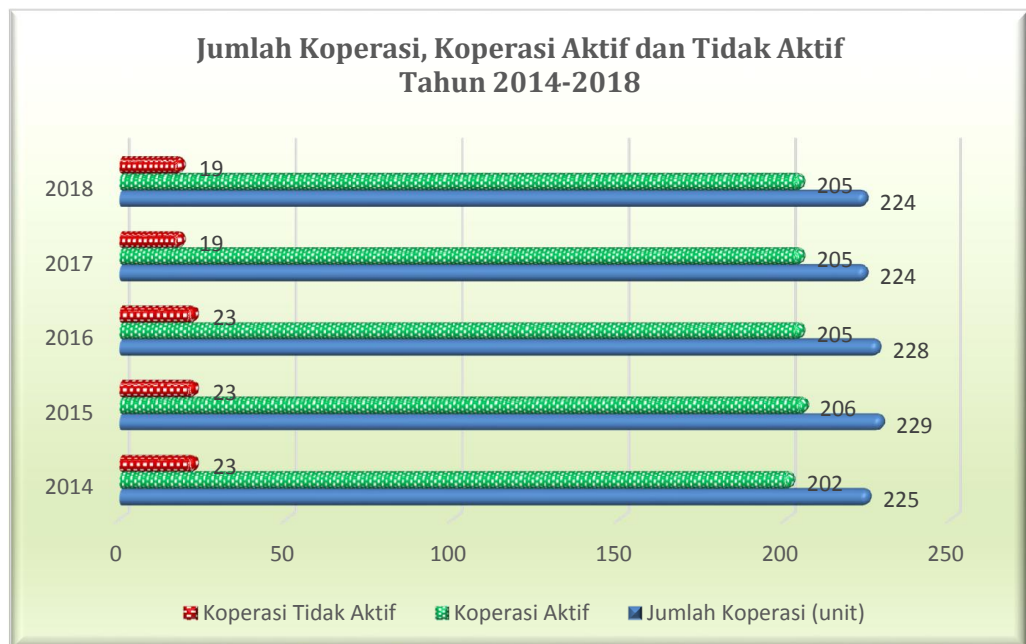
Capaian kinerja ini didukung oleh terlaksananya pembinaan kelembagaan dan peningkatan tenaga pengelola koperasi serta kesadaran anggota untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan usaha koperasi.



Gambaran umum perkembangan perkoperasian di Kabupaten Tanah Datar tahun 2014– 2018 dapat digambarkan pada tabel Perkembangan Keragaan Koperasi sebagai Berikut :

**Perkembangan Keragaan Koperasi  
di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013-2017**

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Koperasi (unit)	225	229	228	224	224
2.	Koperasi Aktif	202	206	205	205	205
3.	Koperasi Tidak Aktif	23	23	23	19	19
4.	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	126	122	110	98	96
5.	Jumlah Anggota (orang)	38.835	39.110	38.756	39.879	39.659
6.	Modal Sendiri (Rp.000)	160.273.400,-	172.229.400,-	215.245.000,-	237.394.032,-	255.728.958,-
7.	Modal Luar (Rp.000)	57.058.100,-	58.704.000,-	63.786.000,-	68.983.722,-	66.979.748,-
8.	Volume Usaha (Rp.000)	231.795.300,-	232.266.700,-	273.174.000,-	285.357.055,-	314.476.844,-
9.	SHU Berjalan (Rp.000)	14.577.000,-	15.567.900,-	17.391.000,-	18.579.421,-	19.517.567,-
10.	Aset (Rp.000)	223.185.600,-	246.501.300,-	280.057.000,-	304.782.556	321.601.416,-



### 3. Peningkatan skala usaha Mikro menjadi Usaha Kecil

Klasifikasi skala usaha mikro, kecil menengah sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kriteria Usaha yang termasuk Mikro, Kecil atau Menengah ditentukan sebagai berikut:

**Kriteria Usaha Mikro:**

- a. memiliki kekayaan bersih **paling banyak Rp. 50 juta Rupiah** (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta Rupiah.

**Kriteria Usaha Kecil:**

- a. memiliki kekayaan bersih **lebih dari Rp. 50 juta Rupiah sampai dengan Rp. 500 juta Rupiah** (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta Rupiah sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 milyar Rupiah.

**Kriteria Usaha Menengah:**

- a. memiliki kekayaan bersih **lebih dari Rp. 500 juta Rupiah sampai dengan paling banyak Rp. 10 milyar Rupiah** (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 milyar Rupiah sampai dengan paling banyak Rp. 50 milyar Rupiah.

Berdasarkan hasil pembinaan dan Data Bidang Koperasi dan UKM bahwa pada tahun 2018 ini penambahan usaha mikro yang menjadi usaha kecil dan menengah berdasarkan aset dan omset yang dimiliki adalah sebanyak 80 unit usaha sehingga target yang direncanakan dapat dicapai 100% (Data usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah, terlampir)

**4. Peningkatan Wirausaha Pemula**

Indikator peningkatan wirausaha pemula dihitung dari wirausaha yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan, yang membuka usaha baru.

Berdasarkan hasil pembinaan dan Data Bidang Koperasi dan UKM bahwa pada tahun 2018 ini wirausaha yang membuka usaha baru sebagai hasil dari pembinaan dan pelatihan adalah sebanyak 120 orang. (Data, terlampir)

Pencapaian pada sasaran *Berkembangnya Usaha Mikro Kecil, menengah dan koperasi* ini didukung dengan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Pembinaan melalui Rapat Anggota Tahunan Koperasi dengan target 100 Koperasi dan terealisasi sebanyak 96 Koperasi
- b. Revitalisasi Kelembagaan Koperasi dalam bentuk terlaksananya pembinaan dan sosialisasi kelembagaan koperasi terhadap koperasi yang tidak RAT diutamakan kepada koperasi Nagari
- c. Terlaksananya penilaian kesehatan usaha simpan pinjam KSP dan USP Koperasi objek sebanyak 50 unit koperasi dengan rincian hasil penilaian:
  - 15 Koperasi predikat sehat
  - 34 koperasi predikat cukup sehat
  - 1 koperasi berpredikat dalam pengawasan yaitu Koperasi Bakat
- d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengawasan Koperasi terhadap 10 Koperasi
- e. Uji Petik Pengawasan Koperasi sebanyak 2 Koperasi didanai dengan APBD Provinsi dan 5 koperasi Didanai dengan APBN
- f. Terlaksananya pembinaan dan penilaian koperasi berprestasi
  - Penilaian oleh PKP RI Provinsi Sumatera Barat diusulkan KPN Karpeng Batipuh Kabupaten Tanah Datar
  - Penilaian oleh Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar dengan hasil :
    - a. Peringkat 1 KPN Kemenag Kabupaten Tanah Datar
    - b. Peringkat 2 KPN SMA 1 Salimpaung
    - c. Peringkat 3 KPN SMP 1 Rambatan
- g. Pendampingan dan Pembinaan UKM  
 Total pendampingan yang dilakukan pada tahun 2018 adalah sebanyak 80 orang pelaku usaha. Hasil pendampingan adalah:
  - Perbaikan manajemen usaha UKM
  - Meningkatnya standarisasi dan kualitas produk yang dihasilkan UKM
  - Terbantunya UKM dalam perbaikan kualitas kemasan dan pemasaran hasil produksi
- h. Sosialisasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI, kepada calon debitur KUR potensial yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Acara sosialisasi dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 10 Oktober 2017 di Aula Executif Bupati

Tanah Datar dengan jumlah peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

## Sasaran 2

## Meningkatnya Daya Saing Industri Daerah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a. Peningkatan jumlah IKM formal (unit)	14	35	250
b. Persentase peningkatan volume usaha IKM (%)	0,3	13,20	

### 1. Peningkatan jumlah IKM formal

Indikator Penambahan jumlah IKM formal ditargetkan sebanyak 14 Unit dan dapat terealisasi sebanyak 38 unit dengan tingkat capaian 250%. Dimana Jumlah IKM formal pada tahun 2017 yang lalu adalah 288 unit, meningkat menjadi 326 unit pada tahun 2018 ini.

### 2. Peningkatan Volume Usaha IKM

Volume Usaha adalah total nilai penjualan/pendapatan barang pada tahun buku yang bersangkutan yang dihasilkan oleh IKM. Nilai Volume usaha IKM tahun 2017 adalah sebesar Rp.726.504.189.000,- dan menjadi sebesar Rp. 844.852.107.000,- pada tahun 2018 atau mengalami peningkatan Rp. 118.347.918.000,-(16,29%)

Indikator peningkatan volume usaha IKM ini ditargetkan meningkat sebesar 0,3% dan dapat dicapai 16,29%

Pencapaian Indikator kinerja dari Sasaran *Meningkatnya Daya Saing Industri Daerah* pada tahun 2018 ini didukung dengan upaya-upaya sebagai berikut :

- Peningkatan SDM pengrajin IKM melalui pelatihan peningkatan proses produksi, yaitu :*

No.	Pelatihan	Materi	Peserta dan Tempat Pelaksanaan
1.	Pelatihan Sulaman Kepala Peniti	Pembuatan Hiasan Busana dengan Alat Jahit Tangan	70 IKM, Simabur, Kec. Pariangan
2.	Pelatihan Desain	Tenun Lanjutan (Desain)	30 IKM, Nagari Tigo Jangko, Kec. Lintau Buo

3.	Pelatihan Bimtek Bordir/Sulaman	Bordir/Sulaman	20 IKM, Nagari Tigo Jangko, Kec. Lintau Buo
4.	Pelatihan pembuatan Renda Songket	Pembuatan Renda Songket	20 IKM, Nagari Tigo Jangko, Kec. Lintau Buo
5.	Pelatihan	Hiasan Busana dengan Mesin Bordir Manual Angkatan II	69 Orang, Nagari Tigo Jangko, Kec. Lintau Buo
6.	Pelatihan	Pembuatan Tenun Datar dengan Alat Tenun Gedogn angkatan II	67 Orang, Nagari Tigo Jangko, Kec. Lintau Buo
7.	Pelatihan	Tenun lanjutan Desain	30 IKM, Nagari Tigo Jangko, Kec. Lintau Buo
8.	Pelatihan	Manajemen Usaha	30 IKM, Aula Dinas Koperindag
9.	Pelatihan	Membatik	30 IKM, Pariangan
10.	Pelatihan	Pewarnaan/Pencelupan Benang	30 IKM, Nagari Tigo Jangko, Kec. Lintau Buo
11.	Pelatihan	Bimtek Cenderamata	30 IKM, Nagari Batu Taba, Kec. Batipuh Selatan
12.	Pelatihan	Menghani Benang Tenun	30 IKM, Nagari Tigo Jangko, Kec. Lintau Buo
13.	Pelatihan	Tenun untuk Pemula	30 IKM, Nagari Tigo Jangko, Kec. Lintau Buo
14.	Pelatihan Menjahit	Pelatihan Menjahit	60 IKM, Nagari Tigo Jangko, Kec. Lintau Buosss
15.	Pelatihan Pewarnaan Alam	Pewarnaan Alam	15 IKM, Nagari Tanjung Modang, Kec. Lintau Buo Utara

b. *Fasilitasi peralatan penunjang proses produksi*

Fasilitasi peralatan bagi kelompok IKM yang memproduksi produk potensial untuk dikembangkan yang dilaksanakan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Spiner untuk pengering makanan bagi kelompok pangan Berkat Yakin di Nagri Situmbuk kecamatan Sungai Tarab
- 1 (satu) unit Mesin Pemotong Ubi bagi kelompok pangan Berkat Yakin di Nagri Situmbuk kecamatan Sungai Tarab

c. *Fasilitasi dan pengembangan standarisasi produk IKM potensial*

- Pelatihan Produk bersih, higienis dan bebas bahan pengawet bagi 20 IKM yang berasal dari 14 kecamatan
- Fasilitasi pengurusan Sertifikat Halal untuk 5 (lima) produk IKM
- Fasilitasi kemasan bagi 23 produk IKM
- Fasilitasi Izin Usaha Industri untuk 14 IKM

d. *Fasilitasi pengembangan pasar melalui promosi/ pameran*

1. Pameran Luar Daerah.

- Pameran Inacraf Tahun 2017 yang berlangsung di JCC Jakarta dari tanggal 25 s/d 29 April 2018.
- Pameran Kriya Nusa di JCC Jakarta dari tanggal 26 s/d 30 September 2018.
- Pameran Festifal Produk Ungulan Nusantara di Auditorium Barat Batam tanggal 13 s/d 19 September 2018
- Pameran Smesco di Jakarta tanggal 30 Maret s/d 2 April 2018.

2. Pameran Dalam Daerah.

- Pameran Sawahlunto Carnaval Internasional (SISCA) tanggal 26 s/d 28 Oktober 2018 Bertempat di kota Sawahlunto
- Kegiatan Pameran dalam rangka Rakor/Koferensi Nasional Hukum Tatanegara ke V Bertempat di hotel Emersia Batusangkar pada tanggal 9-12 November 2018.
- Kegiatan Pameran dalam rangka rakor se-Indonesia PSPA bertempat di Hotel Ina Muara padang tanggal 18 s/d 21 September 2018
- Kegiatan Pameran dalam rangka TMN 2018 di Saruaso, pada tanggal 13 November 2018
- Pameran Pagaruyung EXPO 2018 dilapangan Cindua Mato Batusangkar tanggal 28 November – 2 Desember 2018.

3. Pameran Luar Negeri sebanyak 1 kali yaitu ke Brunei Darusallam pada tanggal 27 Agustus s/d 4 September 2018.

e. *Pembangunan dan Pengembangan Sentra Tenun Lintau*

Pembangunan sentra tenun Lintau pada tahun 2018 ini sebanyak 3 gedung yaitu Rumah Tenun, Gedung Mahani dan Galeri, UPTD dan Koperasi. Pengembangan Sentra Tenun Lintau ini diharapkan dapat berfungsi sebagai :

- Pelaksanaan fasilitasi produksi Sentra Tenun akan memfasilitasi IKM tenun yang dipilih untuk memproduksi memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dalam sentra yang selanjutnya didorong untuk membentuk koperasi .
- Penyelenggaraan operasional pusat penelitian dan pengembangan serta pusat pendidikan dan pelatihan (diklat) Tenun

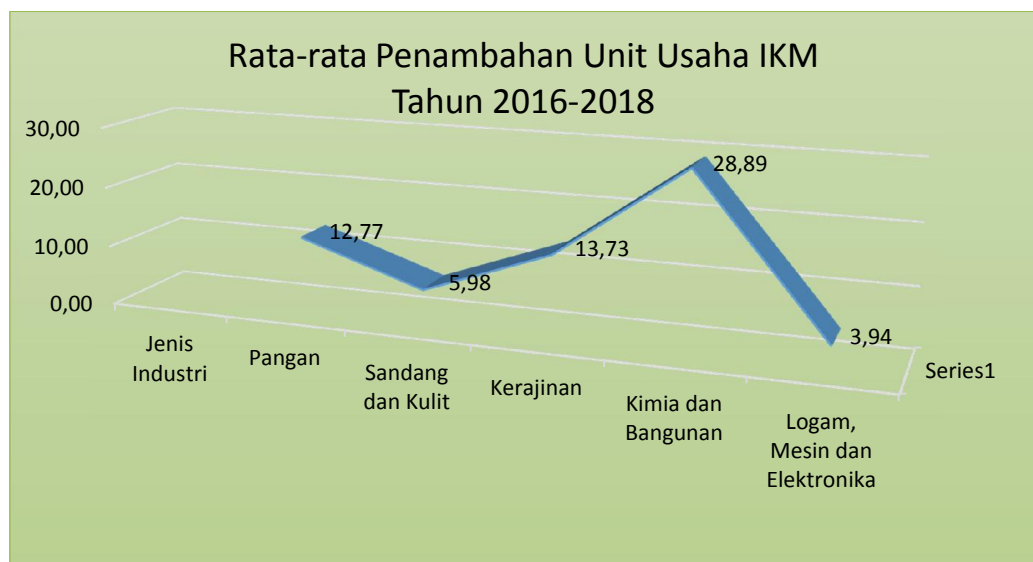
- Melaksanakan fasilitasi kegiatan promosi dan informasi pasar produk tenun

f. Pembangunan Gedung Promosi Kabupaten Tanah Datar

Gedung promosi Kabupaten Tanah Datar yang berlokasi di Nagari Baringin kecamatan Lima Kaum sebagai tempat promosi dan penjualan produk makanan dan pakaian daerah yang berasal dari IKM se-Kabupaten Tanah Datar.

Perkembangan jumlah unit usaha Industri Kecil dan Menengah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 - 2018, pada tabel berikut :

No.	Jenis Industri	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pangan	988	1.108	1.483	1.515	1.550
2.	Sandang dan Kulit	511	511	527	567	608
3.	Kerajinan	100	100	114	114	145
4.	Kimia dan Bangunan	74	77	137	149	149
5.	Logam, Mesin dan Elektronika	49	50	55	56	56
	Jumlah	1.722	1.846	2.316	2.401	2.508

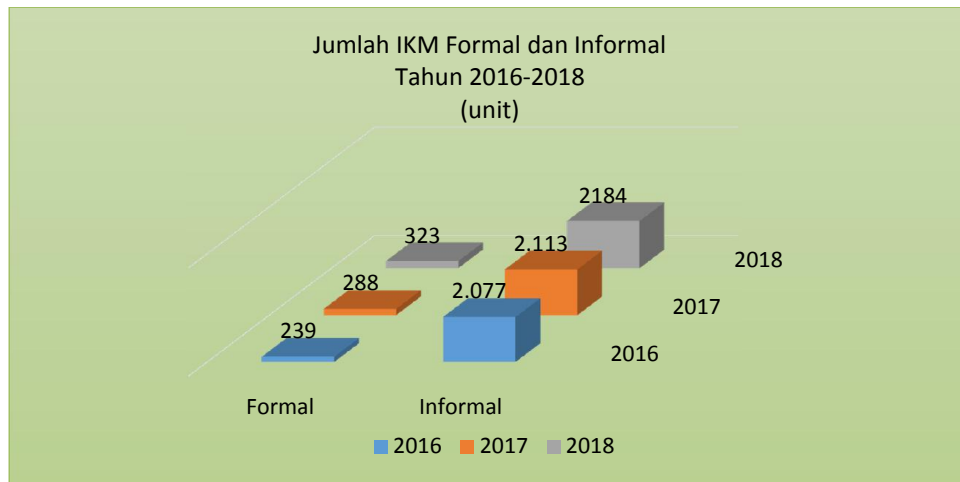


**Data Industri Formal  
di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2018**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	Unit Usaha (unit)	239	239	288	323
2.	Tenaga Kerja (orang)	893	908	1130	1315
3.	Nilai Investasi (Rp,-)	44.766.445.000,-	44.977.977,-	101.661.515,-	106.568.215,-

**Perkembangan Industri Non Formal  
di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2018**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	Unit Usaha (unit)	1.607	2.077	2.113	2.184
2.	Tenaga Kerja (orang)	3.930	5.658	5.958	6.029
3.	Nilai Investasi (Rp.-)	43.379.879.000,-	45.663.583,-	52.104.652,-	52.410.652,-



### Sasaran 3

### Berkembangnya Perdagangan Daerah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a. Jumlah pedagang informal menjadi formal (pedagang)	50	130	260
b. Penambahan pasar yang representatif (pasar)	2	3	150
c. Jumlah pasar nagari yang terkelola dengan kategori baik (pasar)	4	4	100

**1. *Jumlah pedagang informal menjadi pedagang formal***

Indikator ini diukur dari jumlah pedagang informal yang melengkapi perijinan usaha sektor perdagangan. Ditargetkan 50 usaha dan dapat terealisasi sebanyak 130 usaha atau 260%.

**2. *Penambahan Pasar yang Representatif***

Indikator Pasar yang representatif bagi Pedagang ini ditargetkan 2 pasar dan dapat terealisasi sebanyak 3 pasar atau dengan tingkat capaian 150%.



Capaian ini didukung dengan pelaksanaan revitalisasi terhadap Pasar-Pasar Nagari yaitu :

- Pasar Nagari Rao-Rao, Kec. Sungai Tarab
- Pasar Nagari Salimpaug, Kec. Salimpaung
- Pasar Nagari Barulak, Kec. Tanjung Baru (Dana Tugas Pembantuan Kementrian Koperasi dan UKM)

Data Profil pasar di Kabupaten Tanah Datar terlampir (Lamp.2)

### 3. *Pengelolaan Pasar Nagari dengan Kategori Baik*

Indikator ini ditargetkan sebanyak 4 pasar dan dapat terealisasi sebanyak 4 pasar atau dengan tingkat capaian 100%.

Indikator Pengelolaan Pasar Nagari dengan Kategori Baik ini diukur melalui penilaian aspek yang dinilai sebagai berikut :

- Aspek Aksesibilitas
- Aspek Keamanan
- Aspek Kesehatan
- Aspek Kenyamanan
- Aspek Estetika
- Aspek Kecukupan

Adapun Pasar yang dinilai memiliki pengelolaan yang baik pada Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :

- a. Pasar Nagari Tabek Patah
- b. Pasar Nagari Rambatan
- c. Pasar Nagari Balai Tengah
- d. Pasar Nagari Sungai Tarab, sebagai Pasar Tertib Ukur Tahun 2018 dari Kementerian Perdagangan RI.

#### Sasaran 4

#### Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Predikat akuntabilitas kinerja OPD	BB	B	100

### 1. *Predikat akuntabilitas kinerja OPD*

Indikator Predikat akuntabilitas kinerja OPD ditargetkan dengan predikat BB dan sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Dinas Koperindag Tahun 2017 dengan kategori baik.

Predikat akuntabilitas kinerja ini sama dengan Tahun 2018 ini masih berada dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Datar.

## 3.2 REALISASI KEUANGAN

Sesuai dengan tupoksi dan prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Pada Tahun Anggaran 2018 melaksanakan 17 program dan 42 kegiatan, guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dialokasikan dana sebesar Rp 26.322.958.649,- dari dana APBD Kabupaten Tanah Datar, yang terdiri dari dana *Belanja Tidak Langsung* sebesar Rp 3.833.846.900,- dan *Belanja Langsung* sebesar Rp 22.489.111.749,-. Untuk pelaksanaan Program dan kegiatan tahun 2018, dengan rincian belanja sebagai berikut :

No.	Belanja	Anggaran (%)	Realisasi (%)	%
1	<b>Belanja Pegawai</b>	160.162.900,00	134.865.000,00	84,20
2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.526.068.662,00	6.688.317.627,00	88,87
3	<b>Belanja Modal</b>	14.802.880.187,00	11.479.872.337,00	77,55
	<b><i>Jumlah</i></b>	<b><i>22.489.111.749,00</i></b>	<b><i>18.303.054.964,00</i></b>	<b><i>81,38</i></b>

Rincian Anggaran dan realisasi Tahun 2017 dan 2018 untuk masing-masing program dapat dilihat pada rincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel Anggaran dan Realisasi Tahun 2017 dan 2018

NO.	PROGRAM	Plafon Anggaran		Realisasi		(%) Realisasi	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1.	<i>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan</i>	1.588.225.000,00		1.548.333.352,00		97,49	
2.	<i>Program pembangunan infrastruktur perdesaan</i>	6.915.193.636,00	3.408.481.262,00	5.491.114.453,00	3.198.544.506,00	79,41	93,84
3.	<i>Program pengembangan data/informasi</i>						
4.	<i>Program perencanaan pembangunan daerah</i>	38.165.000,00	20.000.000,00	38.091.000,00	19.987.000,00	99,81	99,94
5.	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	376.099.000,00	460.853.000,00	315.029.392,00	375.587.901,00	83,76	81,50
6.	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	227.890.000,00	223.845.000,00	215.892.000,00	219.973.250,00	94,74	98,27
7.	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	23.750.000,00	23.750.000,00	22.565.500,00	18.924.000,00	95,01	79,68
8.	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	24.108.200,00	26.000.000,00	23.943.200,00	25.899.900,00	99,32	99,62
9.	<i>Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif</i>	63.456.400,00	169.822.400,00	59.335.400,00	162.789.500,00	93,51	95,86
10.	<i>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</i>	158.335.100,00	60.000.000,00	140.445.900,00	55.073.000,00	88,70	91,79
11.	<i>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</i>	41.115.000,00	17.030.000,00	32.373.000,00	17.030.000,00	78,74	100,00
12.	<i>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</i>	105.586.900,00	157.300.000,00	105.513.150,00	156.790.300,00	99,93	99,68
13.	<i>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</i>	157.601.000,00	928.576.500,00	153.303.087,00	812.011.954,00	97,27	87,45
14.	<i>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</i>	404.698.200,00	333.309.300,00	323.770.100,00	303.846.684,00	80,00	91,16
15.	<i>Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan</i>	380.580.600,00	85.708.000,00	324.872.884,00	82.190.800,00	85,36	95,90

NO.	PROGRAM / KEGIATAN						
		2017		2017		2017	
	<i>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan</i>		472.880.500,00		148.193.400,00		31,34
16.	<i>Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi</i>	347.240.100,00	211.704.000,00	300.634.935,00	185.691.600,00	86,58	87,71
17.	<i>Program pengembangan industri kecil dan menengah</i>	2.836.644.500,00	15.835.151.787,00	2.764.801.656,00	12.466.605.059,00	97,47	78,73
18.	<i>Program peningkatan kemampuan teknologi industri</i>	129.924.000,00	54.700.000,00	96.877.700,00	54.572.600,00	74,56	99,77
		13.824.020.136,00	22.489.111.749,00	11.962.304.209,00	18.303.711.454,00	86,53	81,39

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) 2018 ini merupakan gambaran kinerja dalam melaksanakan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bidang Koperasi dan UMKM, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan sesuai kewenangan yang dilimpahkan kepada Dinas Koperindag.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperindag merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2018. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya, sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>9. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi</b>	i. Persentase penambahan koperasi aktif (%)	0,5 (92,02)	0,5 (91,52)	99,46
	j. Peningkatan volume usaha koperasi (%)	5	11	220,00
	k. Peningkatan skala usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (Unit)	80	80	100,00
	l. Peningkatan wirausahawan pemula (orang)	120	120	100,00
<b>10. Meningkatnya daya saing industri daerah</b>	e. Peningkatan jumlah IKM formal (unit)	14	35	250,00
	f. Persentase peningkatan volume usaha IKM (%)	0,3	13,20	
<b>11. Berkembangnya perdagangan daerah</b>	g. Jumlah pedagang informal menjadi formal (pedagang)	50	130	260,00
	h. Penambahan pasar yang representatif (pasar)	2	3	150,00
	i. Jumlah pasar nagari yang terkelola dengan kategori baik (pasar)	4	4	100,00
<b>12. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD</b>	Predikat akuntabilitas kinerja OPD	BB	BB	100

Demikianlan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar, semoga bermamfaat dan dapat dijadikan bahan penyusunan LKjIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.